

V. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang mencerminkan hasil dari penelitian tersebut, serta rekomendasi hasil audit yang berguna untuk Dinas Badan Keuangan dan Aset daerah serta Dinas Kominfo dalam mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon.

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah diajukan pada proses *Maturity Level*, diketahui rata-rata tingkat *Maturity Level* dari setiap level fungsinya, berikut uraiannya pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Ringkasan Hasil *Maturity Level* dari setiap Level Fungsi

	Maturity Level Fungsi						
	TI		Manajemen		User		
Maturity	BKAD	Kominfo	BKAD	Kominfo	Operator 1	Operator 2	Operator 3
Rata-rata	0,81	3,06	1,51	1,26	1,525	1,63	0,61
	1,935		1,385		1,255		

2. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa penerapan standar keamanan *ISO 27001* untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon berada pada tingkat 1 atau *initial/Ad hoc*. Hal ini menjelaskan bahwa:
 - a) Responden telah menyadari adanya persoalan yang perlu ditangani, tetapi belum ada standar proses yang harus dilakukan untuk semua level fungsi.
 - b) Penanganan persoalan keamanan dilakukan berdasarkan kasus yang muncul.
 - c) Nilai *Maturity Level* di level fungsi TI Diskominfo jauh lebih besar dari BKAD. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan standar keamanan

informasi dari Diskominfo ke dinas-dinas terkait terutama BKAD agar pengetahuan organisasi mengenai keamanan informasi semakin merata.

d) Tingkat ketergantungan pada admin BKAD, sehingga rentan menimbulkan kesalahan dalam hal pertanggung jawaban.

3. Berikut disertakan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh BKAD dan Dinas Kominfo dalam mengelola keamanan sistem tersebut:

- a) BKAD dan Dinas Kominfo membuat standar proses berupa kebijakan, instruksi, dan dokumentasi untuk menangani persoalan keamanan informasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (rekomendasi kebijakan, instruksi, dan dokumentasi di lampiran 20).
- b) BKAD dan Dinas Kominfo dapat membuat *planning* dan menganalisis resiko keamanan informasi sehingga dapat mencegah persoalan keamanan informasi yang mungkin muncul.
- c) Perlu adanya pelatihan standar keamanan informasi dari Diskominfo ke SKPD terkait terutama BKAD agar pengetahuan organisasi mengenai keamanan informasi semakin merata.
- d) Membuat tugas tugas dan lingkup tanggung jawab yang jelas dalam susunan organisasi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap individu tertentu dan mengurangi penyalahgunaan informasi atau layanan.

5.2. Saran

1. Dalam penelitian ini dilakukan audit keamanan informasi dengan menggunakan *ISO 27001:2005*, diharapkan pada penelitian selanjutnya digunakan versi terbaru yaitu *framework ISO 27001:2013* karena pada *ISO 27001:2013* jumlah domain diperluas dari 11 menjadi 14 yaitu penambahan domain *cryptographic technology* yang membahas penggunaan teknologi

kriptografi dalam melindungi data dan informasi suatu sistem informasi, *secure communications and data transfer* yang membahas bagaimana keamanan pengiriman data dan komunikasi dalam Sistem Informasi, dan domain *security for suppliers and third parties* yang membahas pentingnya keamanan pada penyedia dan pihak ketiga dalam penerapan keamanan informasi.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya setiap bukti dokumen untuk memperjelas jawaban responden harus didapatkan, sehingga penilaian *maturity level* menjadi semakin baik.

